

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ikhwan Prasetya (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari 33 kabupaten/kota di Kalimantan Utara dari tahun 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen menggunakan pengalokasian belanja modal.
- b. Variabel independen menggunakan Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis menggunakan regresi berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabelindependen yang digunakan penelitian sebelumnya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai. Sedangkan penelitian saat ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Sampel penelitian sebelumnya mencakup Laporan Realisasi APBD dari 33 kabupaten/kota di Kalimantan Utara dari tahun 2013-2015, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

2. Maria Valencia Wahyudi dan Nur Handayani (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Jawa Timur. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 6 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Kota/Kabupaten Jawa Timur. Secara parsial Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah alokasi belanja modal.
- b. Variabel independen adalah Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan penelitian sebelumnya adalah Pajak, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penelitian saat ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Sampel penelitian sebelumnya mencakup 6 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

3. Putu Gde Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2015)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005-2009. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen mencakup alokasi anggaran belanja modal.

- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis menggunakan regresi berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel independen yang digunakan peneliti saat ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005-2009, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

4. Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja langsung. Dana alokasi khusus tidak berdampak signifikan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah pengalokasian anggaran belanja modal
- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis yang digunakan berupa regresi berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel independen yang digunakan peneliti saat ini berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2010, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

5. I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2006-2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah pengalokasian anggaran belanja modal
- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2006-2011, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.
- b. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA). Sedangkan peneliti saat ini menggunakan regresi berganda.

6. Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, dan I wayan Suwendra (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah pengalokasian anggaran belanja modal
- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh peneliti saat ini berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

7. Arbie Gugus Wandira (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah pengalokasian anggaran belanja modal
- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis yang digunakan berupa regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

8. Sheila Ardhian Nuarisa (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun

2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah pengalokasian anggaran belanja modal
- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
- c. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen berupa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

9. Andreas Marzel Pelealu (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

secara parsial dan simultan. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2003-2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel dependen adalah pengalokasian anggaran belanja modal
- b. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah.
- c. Teknik analisis yang digunakan berupa regresi berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu berupa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2003-2012, sedangkan peneliti saat ini mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

10. David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per

Kapita. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sayangnya kontribusi dari DAU terhadap Belanja Modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu berupa Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- b. Variabel dependen penelitian terdahulu adalah pendapatan perkapita. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan alokasi belanja modal.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen berupa Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkanj peneliti saat ini menggunakan variabel independen berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel berupa Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali dari tahun 2001 sampai tahun 2004, sedangkan peneliti saat ini

mencakup Laporan Realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

- d. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu adalah analisis deskriptif. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan teknik analisis berupa regresi berganda.



Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu
Variabel Dependen : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	VARIABEL INDEPENDEN								
		PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK	DBH	BELANJA PEGAWAI	PENDAPATAN PERKAPITA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH
1.	Ikhwan Prasetya (2017)		TS	S	TS	S	S			
2.	Maria Valencia Wahyudi dan Nur Handayani (2015)			TS	S				TS	S
3.	Putu Gde Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2015)		S	S	S					
4.	Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati (2014)		S	S	TS					
5.	I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya & A.A.N.B. Dwirandra (2014)	S	S							
6.	Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, dan I Wayan Suwendra (2014)		S	S	S					
7.	Arbie Gugus Wandira (2013)		TS	S	S	S				
8.	Sheila Ardhian Nuarisa (2013)		S	S	S					
9.	Andreas Marzel Pelealu (2013)		S		S					
10.	David Harianto & Priyo Hari Adi (2007)		S	S				S		

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK ; Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

TS : Tidak Signifikan

S : Signifikan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manager dengan pemegang saham. Pemegang saham mempekerjakan manager untuk melakukan tugas untuk kepentingan pemegang saham, termasuk pen dele gasian otorisasi pengambilan keputusan dari pemegang saham kepada manager.

Wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Sebelum Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudiandiserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislative untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badrudin (2012:97) berpendapat bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembalipemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Halim (2004) menyatakan bahwa APBD terdiri dari beberapa komponen:

1. Anggaran Pendapatan, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002)

Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2007:2) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets dalam Jhingan(2000:57) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari aspek dinamis suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS,2003).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004:67) mendefinisikan pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah yang mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari saswa, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

UU Nomor 25 tahun 1999 disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Dana perimbangan dari pemerintah pusat

6. Dana Alokasi Umum

7. Dana Alokasi Khusus

Adapun cara alternative untuk pemungutan pendapatan daerah yang harus dibuatkan sebagai pencarian dana dengan cara:

1. Penerbitan obligasi daerah
2. Pinjaman kepada pihak luar
3. Membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Bekerjasama dengan pihak swasta ke III (investor) untuk membuat dan mengembangkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis strategis.

2.2.6 Dana Alokasi Umum

Mahsun (2011:40) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan potensi daerah. DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap alokasi untuk pembiayaan yang membiayai belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota dan pemerintahan di desa-desa, dan belanja yang tak terduga. Dalam setiap tahunnya terjadi inflasi belanja secara tidak langsung yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kenaikan pegawai terutama PNS. DAU tidak signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004)

2.2.7 Pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian

Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja

modal. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran. Alokasi belanja modal yang besar dapat mendorong pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi setiap masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta (2014) bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.2.8 Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena

masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Penelitian yang dilakukan Siti Haniatun Maslikah (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

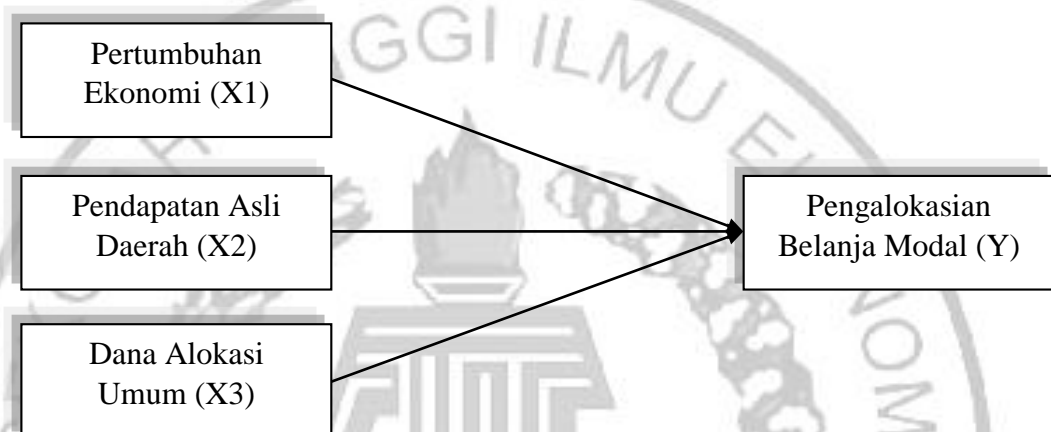
2.2.9 Pengaruh antara Dana Alokasi Umum dengan Pengalokasian Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Berbeda dengan PAD yang berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah.

Dana Alokasi Umum yang didapatkan dari dana APBN yang dialokasikan untuk pemerintah keuangan antar daerah untuk pembiayaan pengeluaran daerah. Jika suatu daerah memiliki DAU yang kecil maka kebutuhan daerahnya juga ikut kecil. Suatu daerah yang memiliki DAU yang besar cenderung akan memiliki belanja modal yang rendah karena DAU digunakan untuk membiayai biaya lain

seperti belanja pegawai, barang, jasa, dan lainnya. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Ikhwan Prasetya (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H1 :Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

H2 :Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal